



2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN KAB PEMALANG



Jl Hos Cokroaminoto No. 3 Pemalang
Kode Pos : 52312
TELP : (0284) 321567



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 akhirnya dapat kami susun dengan segala keterbatasan yang ada.

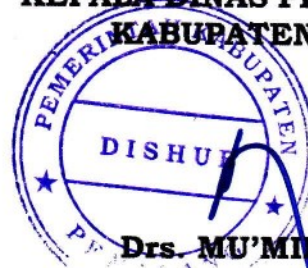
Renja merupakan suatu proses yang berorientasi pada pada hasil yang dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan berbagai potensi dan hambatan yang ada agar dapat mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rancangan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026. Renja ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan serta program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan, dengan memperhitungkan capaian yang telah dicapai sampai dengan tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan Perubahan Renja ini masih perlu dimatangkan lagi melalui berbagai kegiatan antar seluruh komponen organisasi agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Rancangan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 ini.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan seluruh komponen organisasi dalam waktu satu tahun ke depan. Semoga Allah SWT meridhoi segala usaha dan upaya kita.

Pemalang, Juli 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG**



Drs. MU'MINUN., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19680526 199403 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2021	33
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.....	33
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	38
2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat.....	58
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN	59
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	59
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan.....	70
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	72
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN	79
BAB V PENUTUP.....	90

DAFTAR TABEL

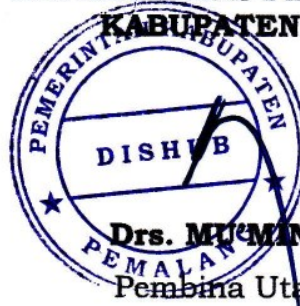
Tabel 2.1 Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2021 Dinas Perhubungan.....	6
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan.....	8
Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d Tahun 2022 Kabupaten Pemalang.....	8
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.....	32
Tabel 2.4 Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2021.....	33
Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023.....	39
Tabel 2.5 Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan 2023	58
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang	71
Tabel 4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perhubungan	80

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

Pemalang, Juli 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG**



Drs. MUHAMMUNUN., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19680526 199403 1 005

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

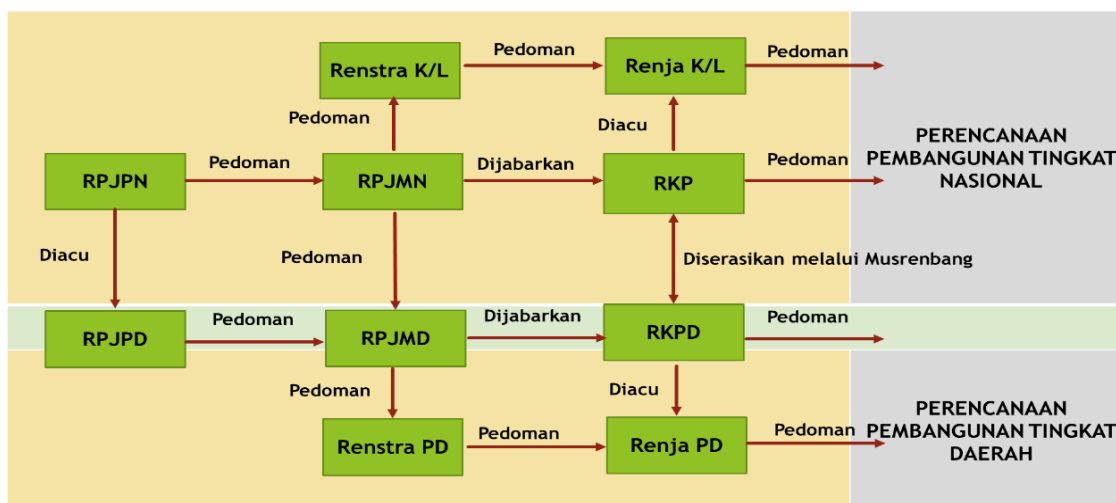
1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang dalam perkembangannya diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membawa konsekuensi perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan system penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektif.

Perencanaan Pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang bertujuan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar perencanaan pembangunan tersebut dapat tersusun dengan baik dan tepat sasaran, maka perlu adanya pedoman Perencanaan Pembangunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dengan memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja-OPD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang merupakan dokumen yang harus disusun oleh Dinas Perhubungan karena Dinas Perhubungan adalah lembaga yang sebagian besar kegiatannya secara langsung berhubungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dari dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan inilah akan dapat dilihat seberapa besar perhatian Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.



Secara umum Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 memuat kebijakan pembangunan transportasi, yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Pemalang dimana secara substansi diawali dengan kondisi umum yang menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2022 secara singkat, serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2023 termasuk isu-isu strategis sektor transportasi. Berdasarkan cakupan tersebut, Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 diharapkan:

1. Menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dan Lembaga lembaga baik pemerintah maupun swasta yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang sebagai bagian dalam penyusunan APBD Kabupaten Pemalang.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018-2038;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang ;
23. Peraturan Bupati Pematang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 67);
24. Peraturan Bupati Pematang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang;
25. Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang;
26. Peraturan Bupati Pematang Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
27. Peraturan Bupati Pematang Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pematang Tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Tahun 2023 antara lain adalah:

- a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategi jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Dinas Perhubungan;

c. Menyediakan acuan resmi bagi Organisasi Dinas Perhubungan dalam menyusun Rencana Anggaran dan Kegiatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang adalah :

- a. Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ;
- b. Untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
- c. Untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja Organisasi Perangkat Daerah ;
- d. Sebagai acuan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pemalang kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD;
- e. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kab. Pemalang
- 2.2. Analisis Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Tahun 2021 adalah merupakan tahap pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021, dan realisasi Renstra Dinas Perhubungan, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perhubungan.

Pada Tahun 2021, Dinas Perhubungan melaksanakan 3 program dengan 18 kegiatan. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021, Anggaran Belanja Dinas Perhubungan adalah sebesar Rp 11.721.771.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 11.421.360.804,00 sehingga capaian realisasi adalah sebesar 97.44%. Sedangkan untuk Pendapatan, dari 5 rekening pendapatan dengan total target anggaran pendapatan sebesar Rp 1.600.000.000,00 realisasi pendapatan adalah sebesar Rp 1.473.552.000,00 sehingga capaian realisasi pendapatan adalah 92.10%.

Berdasarkan sasaran strategis yang hendak dicapai, capaian realisasi anggaran dan kegiatan Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2021
Dinas Perhubungan

No	Sasaran Strategis	Jumlah Kegiatan	Prosentase Pelaksanaan	
			Target	Realisasi
1	Terwujudnya manajemen transportasi darat yang memadai guna mendukung keselamatan lalu lintas jalan	6	100,00%	100,00%
2	Meningkatnya pelayanan teknis pemeriksaan berkala kendaraan bermotor	2	100,00%	100,00%
3	Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan fasilitas perhubungan	3	100,00%	100,00%
4	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat melalui terwujudnya tertib administrasi, sarana perkantoran dan prasarana yang mendukung, peningkatan kualitas SDM, dan sistem pelaporan yang memadai	7	100,00%	100,00%
Jumlah		18	100,00%	100,00%

Dengan demikian, maka rata-rata capaian kinerja Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya adalah sebesar 100,00%. Pencapaian kinerja tersebut dilaksanakan melalui 3 program dengan 18 kegiatan yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Sasaran pertama*, yaitu terwujudnya manajemen transportasi darat yang memadai guna mendukung keselamatan lalu lintas jalan.

Rata-rata tingkat capaian kinerja mencapai 100,00%.

2. *Sasaran kedua*, yaitu meningkatnya pelayanan teknis pemeriksaan berkala kendaraan bermotor.

Tingkat capaian sasaran kinerja mencapai 100,00%. Kondisi ini menunjukkan tercapainya sasaran dari kegiatan yang telah ditetapkan dengan terwujudnya kondisi kerja sebagaimana yang diharapkan dalam pemeliharaan alat uji, kalibrasi dan perbaikan balai uji.

3. *Sasaran ketiga*, yaitu terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan fasilitas perhubungan.

Tingkat pencapaian kinerja yang telah dicapai adalah 100,00%. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana perhubungan (pemeliharaan terminal) telah dilaksanakan seluruhnya.

4. *Sasaran keempat*, yaitu meningkatnya pelayanan kepada masyarakat melalui terwujudnya tertib administrasi, sarana perkantoran dan prasarana yang mendukung, peningkatan kualitas SDM, dan sistem pelaporan yang memadai.

Rata-rata tingkat pencapaian kinerja mencapai 100,00%. Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini menunjukkan bahwa kegiatan sudah terlaksana secara optimal.

Lebih lanjut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan tahun 2021 dan perkiraan realisasi pencapaian renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan
Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d Tahun 2022 Kabupaten Pemalang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu dan akuntabel	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	15 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00	8 Dokumen	4 Dokumen	50.00
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	5 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	0.00
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	5 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	0.00
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	5 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	0.00
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun	5 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00	2 Dokumen	1 Dokumen	50.00
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	15 Dokumen	-	-	-	3 Dokumen	1 Dokumen	33.33
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prersentase administrasi keuangan daerah terpenuhi dalam satu tahun	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	468 Orang 14 Bulan	72 Orang 14 Bulan	72 Orang 14 Bulan	100,00	78 org /14 Bulan	4 Bulan	28.57
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	5700 Dokumen	-	-	-	1000 Dokumen	-	0.00
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang tersusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	-	0.00
2.15.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang tersusun	5 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	0.00
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	55 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	12 Dokumen	6 Dokumen	50.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegi atan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	10 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	-	0.00
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah	100.00	0.00		0.00	100.00		100.00
2.15.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBU) yang tersusun	5 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	0.00
2.15.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah SKPD yang tersusun	10 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	-	0.00
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang tersusun	60 Dokumen	-	-	-	12 Dokumen	-	0.00
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase administrasi kepegawaian perangkat daerah dalam satu tahun	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas terpenuhi	404 Stel	15 Stel	-	0.00	227 Stel	-	0.00
2.15.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dalam satu tahun (jenis)	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00	4 Dokumen	1 Dokumen	25.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	410 Orang	-	-	-	80 Orang	-	0.00
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan teknis	25 Orang	-	-	-	5 Orang	-	0.00
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	20 Jenis 12 Bulan	4 Jenis 12 Bulan	4 Jenis 12 Bulan	100.00	4 Jenis 12 Bulan	4 Bulan	33.33
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	15 Unit	3 Unit	3 Unit	100.00	2 Unit	1 Jenis	50.00
2.13..01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	20 Unit	4 Unit	-	0.00	4 Unit	-	0.00
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	15 Jenis 12 Bulan	3 Jenis 12 Bulan	3 Jenis 12 Bulan	100.00	4 Jenis 12 Bulan	1 Jenis	25.00
2.13..01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	15 Jenis 12 Bulan	3 Jenis 12 Bulan	3 Jenis 12 Bulan	100.00	4 Jenis 12 Bulan	2 Jenis	50.00
2.13..01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis surat kabar yang tersedia	5 Jenis 12 Bulan	1 Jenis 12 Bulan	1 Jenis 12 Bulan	100.00	1 Jenis 12 Bulan	4 Bulan	33.33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegi atan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13..01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	600 Kegiatan	120 Kegiatan	100 Kegiatan	83.33	120 Kegiatan	40 Kegiatan	33.33
2.13..01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jenis arsip dinamis SKPD yang tertata	10 Jenis	2 Jenis	-	0.00	2 Jenis	-	0.00
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pengadaan barang milik daerah dalam satu tahun	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00
2.13.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia					-	-	-
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional tersedia	9 Unit	3 Unit	-	0.00	1 Unit	-	0.00
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	39 Unit	25 Unit	-	0.00	12 Unit	6 Unit	50.00
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	5 Unit	5 Unit	-	0.00	4 Unit	2 Unit	50.00
2.13.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap tersedia (unit)	24 Unit	8 Unit	6 Unit	75.00	11 Unit	9 Unit	36.36
2.13.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud di adakan	1				1 Unit	-	0.00
2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan tersedia	2	-	-	-	2 Unit	-	0.00
2.13.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor di adakan	2	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegi atan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kantor atau Bangunan Lainnya								
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang dikirim	5000 Surat	1000 Surat	1000 Surat	100.00	1000 Surat	-	0.00
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	15 Jenis 12 Bulan	3 Jenis 12 Bulan	3 Jenis 12 Bulan	100.00	3 Jenis 12 Bulan	1 Jenis	33.33
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 Jenis 12 Bulan	1 Jenis 12 Bulan	1 Jenis 12 Bulan	100.00	1 Jenis 12 Bulan	-	0.00
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	255 Orang 12 Bulan	51 Orang 12 Bulan	-	0.00	196 Orang 12 Bulan	68 Orang	34.69
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah dalam satu tahun	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan diperpanjang ijinnya	65 Unit	13 Unit	-	0.00	32 Unit	10 Unit	31.25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	225 Unit	58 Unit	58 Unit	100.00	45 Unit	-	0.00
2.13.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	20 Unit	6 Unit	6 Unit	100.00	50 Unit	-	0.00
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	175 Unit	5 Unit	5 Unit	100.00	35 Unit	-	0.00
2.13.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap tersedia (unit)	30 Unit	30 Unit	30 Unit	100.00	15 Unit	2 Unit	13.33
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	14 Unit	2 Unit	-	0.00	2 Unit	-	0.00
2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	10 Unit	51 Unit	51 Unit	100.00	2 Unit	1	50.00
2.13.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	85 Unit	17 Unit	17 Unit	100.00	20 Unit	-	0.00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegi atan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/K egiatan/Su b Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase wilayah yang telah di tetapkan rencana induk LLAJ	20.00	20.00		100.00	40.00		100.00
		Perentase titik pengawasan LLAJ	-	-	-	-	100.00	-	-
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ tersusun	4 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	0.00	1 Dokumen	-	0.00
2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Perbup Rencana Induk Jaringan LLAJ yang di tetapkan	6 Dokumen	1 Dokumen	-	0.00	2 Dokumen	2	100.00
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah titik pengendalian dan pengawasan LLAJ	100 Titik	-	-	-	20 Titik	8	40.00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Presentase perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota tersedia	81.00	60.00		100.00	63.00		100.00
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan Terbangun	15 Unit	3 Unit	-	0.00	2 Unit	1 Unit	50.00
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan terbangun	234 Unit	6 Unit	2 Unit	33.33	5 Unit	1 Unit	20.00
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan terpelihara	190 Unit	29 Unit	2 Jenis 12 Bulan	100.00	7 Unit	2 Unit	28.57

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegi atan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan terpelihara	10822 Unit	2016 Unit	4 Jenis 12 Bulan	100.00	65 Unit	47 Unit	72.31
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal penumpang tipe C yang sesuai standar	62.50	25.00	-	100.00	37.50		100.00
2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah kajian rencana pembangunan terminal type C	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	0.00
2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah gedung terminal yang di bangun	1 Unit	-	-	-	-	-	-
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah sarana dan prasarana terbangun	7 Unit	-	-	-	3 Unit	-	0.00
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal terpelihara	8 Unit	8 Unit	-	0.00	3 Unit	-	0.00
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	50 Orang	-	-	-	10 Orang	-	0.00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	83.65	50.00		100.00	56.94		100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitas parkir terbangun	25 Unit	-	-	-	5 Unit	-	0.00
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah titik parkir yang dilakukan pengawasan	2500 Titik	350 Kali	40 Kali	11.43	400 Titik	300 Titik	75.00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan diuji	70.00	65.00		100.00	65.00		100.00
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian tersedia	5 Unit	1 Unit	3 Jenis 12 Bulan	100.00	1 Unit	1 Unit	100.00
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah SDM pengujian yang mengikuti Diklat	20 Orang	-	-	-	4 Orang	-	0.00
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bukti lulus uji diadakan	33100 Unit	4000 Unit	4000 Unit	100.00	4000 Unit	-	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah peserta sosialisasi SOP Pengujian Kendaraan bermotor	1000 Orang	-	-	-	200 Orang	-	0.00
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian terpelihara	55 Unit	11 Unit	11 Unit	0.00	11 Unit	11 Unit	100.00
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah koordinasi pengujian kendaraan bermotor	120 Unit	-	-	-			
2.15.02.2.05.09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah perda retribusi Pengujian Kendaraan bermotor di terbitkan	0	-	-	-			
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen kajian SKM	5 Dokumen	1 Dokumen	-	0.00	1 Dokumen	-	0.00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menerima pengetahuan tentang lalu lintas	31.00	32.00		100.00	32.00		100.00
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rakayasa lalu lintas	4000 Orang	800 Orang	1 Jenis 12 Bulan	100.00	800 Orang	-	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegi atan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah titik pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	90 Titik	15 Titik	6 Jenis 12 Bulan	100.00	17 Titik	15 Titik	88.24
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta forum lalu lintas	1750 Orang	200 Orang	2 Jenis 12 Bulan	100.00	30 Orang	24 Orang	80.00
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	persentase pembangunan pusat kegiatan yang sudah mempunyai dokumen andalalin	80.00	-	-	-	80.00		100.00
2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Perbup Andalalin	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	0.00
2.15.02.2.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	2 Orang	-	-	-	1 Dokumen	-	0.00
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah pengawasan Dokumen Andalalin disuatu pusat kegiatan	100 Titik	-	-	-	10 Titik	-	0.00
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase awak angkutan yang mengikuti pemilihan awak angktan teladan	20.00	20.00	-	0.00	20.00		100.00
2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diramcek (Uji Petik)	250 Kendaraan	-	-	-	50 Kendaraan	25 Kendaraan	50.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah posko mudik	10 Posko	2 Posko	-	0.00	2 Posko	1 Posko	50.00
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pemilihan awak angkutan teladan	200 Orang	40 Orang	-	0.00	40 Orang	-	0.00
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang di inspeksi/ audit	45 Perusahaan	-	-	-	9 Perusahaan	-	0.00
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase awak angkutan yang mengikuti pemilihan awak angkutan teladan	15.91	12.08		100.00	12.92		100.00
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan yang dioprasi	7000 Kendaraan	1100 Kendaraan	40 Kendaraan	3.64	1200 Kendaraan	600 Kendaraan	50.00
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Trayek Angkutan Perkotaan dan Pedesaan	58.82	58.02		100.00	77,66%		100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegi atan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2.15.02.2.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Trayek / Kartu Pengawasan yang di perbaharui	533 Kendaraan	322 Kendaraan	322 Kendaraan	100.00	109 Kendaraan	40 Kendaraan	36.70
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor di Bidang Angkutan/Perhubungan (kali)	150 Kali	30 Kali	5 Kali	16.67	23 Kali	8 Kali	34.78
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketersediaan Dokumen Evaluasi Jaringan Trayek	30.30	39.13		0.00	60.87	-	0.00
2.15.02.2.14.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan	Jumlah dokumen evaluasi jaringan trayek tersusun	4 Dokumen	1 Dokumen	-	0.00	1 Dokumen	-	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegi atan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Prosentase persyaratan pembangunan pelabuhan yang terpenuhi	100.00	80.00	-	0.00	100.00	-	0.00
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	jumlah persyaratan pembangunan pelabuhan yang di penuhi	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0.00	1 Dokumen	-	0.00
2.15.03.2.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah kajian pembangunan pelabuhan yang di susun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0.00	1 Dokumen	-	0.00

Pada tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang mendapatkan Anggaran Belanja sebesar Rp 11.721.771.000,00 untuk melaksanakan 18 kegiatan dengan realisasi anggaran mencapai 97.44% dengan capaian program 100%. Pada sektor belanja dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 masih terdapat 4 kegiatan dimana capaian realisasi belanja masih di bawah target (85%). Hal ini dikarenakan adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan, maupun karena pelaksanaan kegiatan yang kurang tepat, sehingga tidak sesuai dengan DPA yang ada.

Adapun kendala teknis yang dihadapi yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran belanja adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

Capaian realisasi 55,62% Belanja koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran skpd tidak terserap karena jumlah surat yang dikirim tidak sesuai dengan target jumlah surat yang di tetapkan pada penetapan anggaran.

2. Penyediaan Bahan Logistik kantor

Capaian realisasi 76,95% Belanja pengisian tinta mesin foto copy tidak terserap dikarenakan volume foto copy data-data kantor lebih sedikit dari yang di rencanakan.

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Realisasi anggaran sebesar 75 % Pada belanja jasa peralatan dan perlengkapan kantor kami anggarkan untuk antisipasi denda keterlambatan pembayaran pajak, tetapi pembayaran pajak kendaraan dinas/oprasional dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan pada STNK.

4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Capaian realisasi 81,28%, hal ini di sebabkan karena volume pemakaian peralatan kerja selama tahun 2021 menurun drastis karena berkurangnya volume pekerjaan yang disebabkan adanya pandemi covid 19, sehingga perbaikan peralatan kerja juga tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan.

5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan

kabupaten/kota serapannya sebesar 65,71% hal ini di karenakan adanya kebijakan Pemerintah untuk melaksanakan Work From Home (WFH) sehingga penyediaan makanan dan minuman tidak terserap maksimal.

6. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Serapan pada kegiatan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota sebesar 70,73 % hal ini di sebabkan karena pengadaan pompa air, torn untuk panampungan air di Dinas Perhubungan Kab. Pematang Jaya, tetapi pada pelaksanaan telah di masukkan ke dalam

Informasi di atas diharapkan dapat dijadikan catatan dalam pengambilan keputusan terutama untuk perencanaan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik memenuhi target kinerja yang diharapkan.

Diperlukan adanya Kerjasama dan koordinasi yang baik antar bidang dan sekretariat terutama dalam penata usahaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga dalam penyusunan Anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan sesuai dengan DPA.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Bahwa Dinas Perhubungan pada dasarnya mengampu satu bidang urusan yaitu urusan Perhubungan maka sesuai dengan urusan yang dibebankan tersebut maka Dinas Perhubungan berdasarkan kewenangannya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Kewenangan, Tugas Pokok, dan Fungsi

1) Kewenangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya, bahwa kewenangan desentralisasi yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya adalah Bidang Perhubungan.

2) Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya merupakan unsur pelaksanaan

Pemerintah Kabupaten di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang, berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

3) Fungsi

Didalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang merupakan salah satu dinas daerah yang mempunyai tugas pokok “Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perhubungan”, oleh karena itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang harus dapat memberikan pelayanan umum sebaik-baiknya kepada masyarakat baik pelayanan administratif maupun pelayanan teknis guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, pelayanan yang dapat diberikan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang meliputi :

1) Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang telah menyediakan pelayanan Angkutan Umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan dan jaringan trayek berupa Angkutan Perkotaan (137 kendaraan dalam 10 trayek), Angkutan Perdesaan (325 kendaraan dalam 20 trayek), Angkutan Perbatasan (30 kendaraan dalam 3 trayek). Selain itu juga tersedia bus yang melayani antar kota berupa Angkutan Antar

Kota Dalam Provinsi (AKDP), dan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP). Perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang terdiri dari Izin Trayek dan Izin Insidentil. Angkutan Umum dalam trayek yang ada di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut

- Angkutan Perkotaan

No	Trayek	Jumlah
1.	A : Terminal Induk – Sumberharjo PP	11
2.	B : Terminal Induk – Petarukan PP	26
3.	C : Terminal Induk – Widuri PP	08
4.	D : Terminal Induk – Sumberharjo PP	009
5.	E : Terminal Induk – Petarukan PP	025
6.	F : Terminal Induk – Sungapan PP	006
7.	G : Terminal Induk – Banjarmulya PP	010
8.	G1 : Terminal Induk – Banjarmulya PP	013
9.	H : Terminal Induk – Loning PP	014
10.	I : Terminal Induk – Jebed PP	015

- Angkutan Perdesaan

No	Trayek	Jumlah
Berpusat di Petarukan :		
1.	Petarukan – Karangasem – Comal PP	11
2.	Klareyan – Petarukan – Pener PP	21

No	Trayek	Jumlah
Berpusat di Comal :		
1.	Comal – Tegalsari – Banjardawa PP	18
2.	Comal – Kaliwadas – Cikadu PP	20
3.	Comal – Pesantren – Petarukan PP	25
4.	Comal – Kaliprau – Blendung PP	10
5.	Comal – Pamutih – Blendung PP	15
6.	Comal – Mojo – Blendung PP	15
7.	Comal – Kebojongan PP	06
8.	Comal – Bodeh – Kesesi PP	
Berpusat di Randudongkal :		
1.	Randudongkal – Tanahbaya PP	29
2.	Randudongkal – Bantabolang PP	10
3.	Randudongkal – Watukumpul PP	010
4.	Randudongkal – Warungpring PP	033
5.	Randudongkal – Belik – Cikadu PP	025
6.	Randudongkal – Kecepit- Moga PP	017
Berpusat di Moga :		
1.	Moga – Karangasari – Simpar PP	10
2.	Moga – Pulosari – Belik PP	08
3.	Moga – Mandiraja – Warungpring PP	10
Berpusat di Bantarbolang :		
1.	Bantarbolang – Kuta - Ps. Pagi PP	012
2.	Bantarbolang – Kesesirejo PP	010
3.	Bantarbolang – Kebongede – Ps. Pagi PP	004

Sedangkan perizinan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Perizinan	Tahun 2018
1.	Izin Trayek	62
2.	Izin Insidentil	0
Jumlah		62

Dibanding tahun sebelumnya, permintaan Izin Insidental berkurang, hal ini dapat disebabkan karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan bus pariwisata maupun kendaraan pribadi dalam bepergian untuk keperluan wisata maupun keluarga. Disamping telah tersedia angkutan umum dalam trayek, di Kabupaten Pemalang terdapat angkutan tidak dalam yang terdiri dari

- Angkutan taksi

Pada Tahun 2016 di Kabupaten Pemalang telah direalisasikan mobil penumpang berupa taksi untuk melayani masyarakat yang membutuhkan taksi. Saat ini baru terealisasi sebanyak 4 unit kendaraan dari rencana target sebanyak 30 unit, melihat kondisi kebutuhan masyarakat.

- Angkutan barang untuk penumpang

Angkutan ini melayani daerah-daerah terpencil (pegunungan) dengan daerah-daerah yang telah berkembang (ibukota kecamatan) berupa kendaraan angkutan barang. Hal ini karena kultur/kebiasaan masyarakat setempat yang masih membutuhkan angkutan barang sebagai angkutan penumpang. Daerah-daerah yang masih terdapat angkutan barang sebagai angkutan penumpang antara lain di daerah : Watukumpul, Belik, Pulosari, Moga, Warungpring, Randudongkal, dan Bantarbolang.

2) Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang menyediakan prasarana/fasilitas angkutan jalan berupa : halte, shelter dan terminal. Untuk tahun 2020 jumlah halte 24 buah, shelter 3 buah dengan kondisi baik. Sedangkan jumlah terminal penumpang yang ada sebanyak 8 buah, terdiri dari : Terminal Randudongkal, Terminal Moga, Terminal Belik, Terminal Warungpring, Terminal Angkot Pemalang, Terminal Petarukan, dan Terminal Comal dan Terminal Grosir Comal Agar dapat tetap berfungsi dengan baik, diperlukan adanya pelaksanaan kegiatan pemeliharaan terminal dan peningkatan fungsi terminal.

3) Fasilitas Perlengkapan Jalan

Guna mendukung keselamatan transportasi jalan, Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas, Pengadaan Marka Jalan, Pengadaan Sarana dan Prasarana

Perlengkapan Jalan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian, dan Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas.

Fasilitas perlengkapan jalan yang telah dipasang Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya baik di jalan Kabupaten, jalan Provinsi, maupun jalan Nasional adalah sebagai berikut :

No	Jenis Fasilitas dan Perlengkapan Jalan	Sampai dengan Tahun							Terpasang
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	RPPJ	50	146		24	-	7	4	231
2.	Rambu R-60	50	1074	296	-	118	-	-	1538
3.	Rambu R-40	-	-	-	-	-	-	-	0
4.	Rambu R-45	-	47	-	-	-	-	-	47
5.	Rambu R-90	-	6	-	-	-	-	-	6
6.	Rambu Penunjuk Jurusan	-	21	-	-	-	-	-	21
7.	Rambu Petunjuk Jalur Alternatif	-	48	-	-	-	-	-	48
8.	Rambu Sementara	-	-	25	-	-	-	-	25
	Rambu Elektronik	-	-	1	-	-	-	-	1
9.	Papan Nama Jalan	-	122	-	-	-	-	-	122
10.	Rambu Himbauan	-	3	-	-	10	-	-	13
11.	Delineator	-	90	-	-	-	-	-	90
12.	Guardrail	-	487	3 beam	-	-	22 beam	-	512
13.	Cermin Tikungan	9	19	6	-	-	2	-	36
14.	Marka Jalan	255	6739 m2	1301 m2	436 m2	1731 m2	400 m2	1200 m2	12062
15.	Halte	-	13	1	2	3	-	-	
16.	Shelter		3	-	-	-	-	-	
17.	Traffic Light	1	12	3	1	2	2	-	21
18.	Warning Light	7	29	11	-	5	-	-	52
19.	Counterdown Timer	-	12	-	-	-	-	-	12
20.	Pita Kejut	-	-	3	3	-	-	-	6
21.	Pintu Perlintasan KA	-	-	3	1	2	-	-	
TOTAL									14843

Selain kegiatan yang telah dilakukan seperti tersebut di atas, masih banyak hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya, mengingat masih adanya kekurangan atau hal-hal yang harus dilakukan, antara lain :

- kondisi APILL (traffic light) yang sudah tua memerlukan adanya penggantian. Berhubungan terletak pada jalan nasional dan provinsi pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi penggantian APILL menjadi sulit, memerlukan koordinasi yang lebih baik.
- Sudah pudar/hilangnya marka jalan dan *zebracross*, terutama yang terdapat di jalan-jalan protokol ibukota kabupaten dan di depan sekolah-sekolah.
- Kurang tertibnya parkir yang ada di badan jalan, di jalan-jalan protokol yang melalui kawasan/pusat perdagangan di ibukota kabupaten.
- Masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas untuk jalan-jalan kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan di wilayah Kabupaten Pemalang, mengingat kondisi geografis Kabupaten Pemalang bagian Selatan yang berupa dataran tinggi banyak memerlukan rambu lalu lintas sebagai petunjuk dan peringatan bagi para pengguna jalan demi keamanan dan keselamatan berlalu lintas.
- Hilangnya beberapa rambu lalu lintas yang telah dipasang, karena kurangnya pengertian masyarakat akan arti pentingnya rambu lalu lintas bagi pengguna jalan.
- Masih banyak dibutuhkan pengaman jalan khususnya di wilayah bertebing curam dan tanjakan maupun penurunan jalan yang tajam
- Perlunya koordinasi dalam pembangunan dan peningkatan keselamatan lalu lintas pada perlintasan sebidang.
- Belum adanya masterplan lalu lintas di Kabupaten Pemalang, sehingga pemasangan rambu lalu lintas hanya berdasarkan pada hal yang mendesak dan penggantian rambu yang sudah ada.

4) Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Untuk mengetahui kondisi laik/tidaknya kendaraan bus/barang yang akan beroperasi di jalan dan sebagai kelengkapan kendaraan, Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang memberikan pelayanan teknis berupa Pemeriksaan/Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) di wilayah Kabupaten Pemalang pada Tahun 2021 sudah mencapai 9.070 lebih kendaraan. Oleh karena itu, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang melaksanakan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan prasarana

berupa 1 gedung balai pengujian kendaraan bermotor dan sarana berupa 9 set alat pengujian kendaraan bermotor. Untuk menjamin kelancaran dan seakuratan peralatan uji tersebut, dilakukan kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi alat uji. Selain kegiatan di atas, hal yang juga penting adalah diperlukannya suatu sistem informasi manajemen yang mendukung kinerja pengujian kendaraan bermotor berupa software atau aplikasi penyimpanan data pengujian kendaraan bermotor. Pada akhir tahun 2014, Dinas Perhubungan memperoleh bantuan software pengujian kendaraan bermotor. Dari jumlah kendaraan yang melakukan uji berkala tersebut, diperoleh data jumlah KBWU dan Kendaraan yang melakukan uji berkala di Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya sebagai berikut :

Jenis Kendaraan	KBWU					Kendaraan yang Diuji				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Mobil Barang						10,880		11,830	8.801	8.102
Bus						1,173		943	1.031	953
Jumlah	7,560	7,489	8,544	8.93	9070	12,053	11,704	12,773	9.832	9.055

Untuk satu kali Pemeriksaan/Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor berlaku untuk 6 (enam) bulan, sehingga dalam satu tahunnya dilakukan dua kali pengujian terhadap masing-masing kendaraan.

Dari semua kendaraan yang diuji tersebut, dapat diperoleh data Tahun 2021 bahwa di Kabupaten Pematang Jaya terdapat 9.070 Kendaraan Bermotor Wajib Uji, dan yang melakukan uji berkala 9.055 kendaraan atau sebanyak 99,4%, angka prosentase tersebut menunjukkan bahwa target pelaksanaan uji kendaraan tidak tercapai target kendaraan yang telah ditetapkan di Tahun 2021.

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam pengujian kendaraan harus ditingkatkan kembali.

5) Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menunjang pelayanan bidang perhubungan pada umumnya diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan handal agar dapat memberikan pelayanan lebih baik. Jumlah SDM bidang perhubungan, berdasarkan SPM ini terdiri dari :

- Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran (UTPP) dari 8 unit terminal dan Perparkiran yang ada, SDM yang bertugas sebanyak 37 orang;
- Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor. Pada seksi Pengujian Kendaraan Bermotor SDM yang ada terdiri dari 4 orang Penguji, 2 orang petugas Administrasi/Teknis Pengujian, dan 3 orang petugas Pendukung Teknis Pengujian.
- Bidang MRL, Evaluasi Andalalin terdiri dari : 2 orang yang bertugas dalam bidang MRL dan Evaluasi Andalalin.
- Pengawas Kelaikan Jalan. SDM yang bertugas sebagai pengawas kelaikan jalan berjumlah 2 orang, sayangnya masih belum memiliki kompetensi dalam hal pengawasan kelaikan jalan. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya pelatihan teknis untuk diklat PPNS bidang Perhubungan.

6) Keselamatan

Saat ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya belum menetapkan standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek yang ada. Untuk keselamatan di jalan terutama pada perlintasan sebidang dengan KA, Dinas Perhubungan sudah mengadakan peningkatan sarana pengamanan perlintasan KA dari yang semula bambu menjadi pintu perlintasan semi otomatis. Untuk peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang sedang diupayakan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Pemalang

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Dinas Perhubungan				Realisasi Capaian %		Proyeksi		Catatan Analisis
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio		✓		75,5	75,75	76	76,5	100%	-	-	-	-
		Persen			✓	70	70	70	75	100%	-	-	-	-
	Persentase Pelayanan Angkutan Jalan	Persen		✓		0,25	0,5	0,75	1	100%	-	-	-	-
	Level of Service	Rasio		✓	✓	0,44	0,44	0,43	0,43	100%	-	-	-	-

Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2021

Dalam rangka pelaksanaan pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan peraturan presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya. Hal ini tujuan evaluasi tersebut yaitu :

- Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
- Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi

Evaluasi dinilai melalui 5 komponen manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Dari evaluasi yang dilakukan Inspektorat, nilai yang didapatkan Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya dari 5 komponen manajemen kinerja yaitu :

Tabel 2.4
Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2021

No.	Uraian Hasil Evaluasi	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja Renstra Dinas Perhubungan masih terdapat beberapa kelemahan yaitu Renstra tidak memastikan sudah direview berkala dan dalam Renja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran	30%	22,15
2	Pengukuran Kinerja Peningkatan kualitas pengukuran kinerja dan tindak lanjut atas permasalahan yang menghambat capaian kinerja	25%	10,31
3	Pelaporan Kinerja Perbaikan kualitas penyajian informasi dalam LKJiP	15%	9,96
4	Evaluasi Internal Evaluasi Internal belum dilakukan secara berkala dan belum terdokumentasi secara tertib	10%	4,50
5	Capaian Kinerja Sebagian besar capaian target berasal dari indikator yang bersifat <i>Output</i> bukan <i>Outcome</i>	20%	11,69
	Jumlah	100,00	58,61

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Isu penting penyelenggaraan akan membahas mengenai isu yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya, visi misi Kabupaten Pematang Jaya, renstra Kementerian Perhubungan dan telaah isu yang sesuai dengan permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya.

a. Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang

Isu dan permasalahan yang mendesak saat ini berkenaan dengan bidang perhubungan di wilayah Kabupaten Pematang adalah sebagai berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Sistem konektivitas antar wilayah belum optimal	kurangnya pelayanan angkutan umum di kab. Pematang	<ol style="list-style-type: none"> 1. kurangnya pembinaan thd layanan angkutan umum 2. belum adanya pembaharuan jaringan trayek menyeluruh 3. Diperlukannya pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan umum
		Masih rendahnya efektivitas simpul transportasi di terminal	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terpenuhinya sarana prasarana terminal penumpang sesuai dengan standar Pelayanan - Belum terbangunnya terminal bongkar muat - Kurangnya kapasitas SDM pengelola terminal
		Belum adanya pelabuhan pengumpan lokal	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis perijinan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal
2	Potensi kemacetan di kawasan perkotaan	- Manajemen lalu lintas di perkotaan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan sarana prasarana perlengkapan lalu lintas belum optimal - Manajemen dan SDM pengelola parkir belum optimal - Banyaknya titik-titik rawan kemacetan di perkotaan pada jam tertentu - Adanya potensi gangguan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan baru di Ruas Jalan Kabupaten
3	Tingginya potensi kecelakaan lalu lintas	Masih rendahnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) untuk melakukan uji berkala	<ul style="list-style-type: none"> - tidak adanya sanksi administrasi terhadap keterlambatan pengujian berkala KBWU - kurangnya pemahaman keselamatan transportasi
		Belum terpenuhinya fasilitas Perlengkapan jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terpenuhinya Fasilitas Perlengkapan Jalan - Belum semua perlintasan sebidang terpasang palang pintu

b. Visi Misi Program Kepala Daerah Kabupaten Pematang

Isu dan permasalahan visi misi kepala daerah yang mendesak saat ini di Bidang perhubungan di wilayah Kabupaten Pematang adalah sebagai berikut :

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Visi : Terwujudnya Kabupaten Pematang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni				
Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1.kurangnya pelayanan angkutan umum di kab pematang 2.Masih rendahnya efektivitas simpul transportasi di terminal 3.Belum adanya pelabuhan pengumpan lokal 4.Manajemen lalu lintas di perkotaan belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. kurangnya pembinaan thd layanan angkutan umum 2. belum adanya pembaharuan jaringan trayek menyeluruh 3. Diperlukannya pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan umum 4. Belum terpenuhinya sarana prasarana terminal penumpang sesuai dengan standar Pelayanan 5. Belum terbangunnya terminal bongkar muat 6. Kurangnya kapasitas SDM pengelola terminal 7. Belum terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis perijinan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal 8. Pengelolaan sarana prasarana perlengkapan lalu lintas belum optimal 9. Manajemen pengelolaan Parkir dan SDM pengelola parkir belum optimal 10. Banyaknya titik-titik rawan kemacetan di perkotaan pada jam tertentu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya program PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) terutama pada kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota,dan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Adanya program PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) terutama pada kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 3. Adanya program pengelolaan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang 4. Adanya program PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) terutama pada kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
		<p>5. Masih rendahnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) untuk melakukan uji berkala</p> <p>6. Belum terpenuhinya fasilitas Perlengkapan jalan</p>	<p>11. Adanya potensi gangguan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan baru di Ruas Jalan Kabupaten</p> <p>12. tidak adanya sanksi administrasi terhadap keterlambatan pengujian berkala KBWU</p> <p>13. kurangnya pemahaman keselamatan transportasi</p> <p>14. Belum terpenuhinya Fasilitas Perlengkapan Jalan</p> <p>15. Belum semua perlintasan sebidang terpasang palang pintu</p>	<p>5. Adanya program PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) terutama pada kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p> <p>6. Adanya program PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) terutama pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</p>
Desa Wisata (Dewi)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan	<p>1. Belum terpenuhinya fasilitas Perlengkapan jalan</p> <p>2. kurangnya pelayanan angkutan umum di kab pemalang</p>	<p>1. Belum terpenuhinya Fasilitas Perlengkapan Jalan</p> <p>2. Layanan Angkutan umum tidak sesuai standar</p> <p>3. masyarakat kurang berminat menggunakan angkutan umum</p> <p>4. kurangnya pembinaan thd layanan angkutan umum</p> <p>5. belum adanya pembaharuan jaringan trayek menyeluruh</p>	<p>1. Adanya program PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) terutama pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>2. Adanya program PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) terutama pada kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>

c. Renstra Kementerian Perhubungan

Isu dan permasalahan Renstra Kementerian Perhubungan yang mendesak saat ini di Bidang perhubungan di wilayah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	kurangnya pelayanan angkutan umum di kab pemalang	<ol style="list-style-type: none"> 1. kurangnya pembinaan thd layanan angkutan umum 2. belum adanya pembaharuan jaringan trayek menyeluruh 3. Diperlukannya pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan umum 	Adanya program PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) terutama pada kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya keselamatan transportasi Meningkatkan kualitas SDM transportasi yang kompeten	Belum terpenuhinya fasilitas Perlengkapan jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya Fasilitas Perlengkapan Jalan 2. Belum semua perlintasan sebidang terpasang palang pintu 	Adanya program PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) terutama pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Manajemen lalu lintas di perkotaan belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan sarana prasarana perlengkapan lalu lintas belum optimal 2. Manajemen dan SDM pengelola parkir belum optimal 	Adanya program PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) terutama pada kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang terhadap visi misi dan program prioritas Bupati, Renstra Kementrian

Perhubungan, dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, yaitu

1. Konektifitas

Belum optimalnya pelayanan inter/antarmoda transportasi yang menghubungkan antar terminal tipe C dan stasiun kereta api serta obyek-obyek wisata, Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan umum sebagai penghubung pusat kegiatan strategis

2. Simpul

Belum optimalnya penyelenggaraan terminal tipe C; Belum terselesaikannya pembangunan terminal angkutan barang; Belum optimalnya pemanfaatan terminal agro bisnis

3. Ruang Pergerakan

Belum optimalnya pelaksanaan manajemen lalu lintas; Tingginya volume kendaraan (LHR) di jalan perkotaan yang mengakibatkan kemacetan; Belum optimalnya pengelolaan parkir

4. Keselamatan

Tingginya pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan umum atau pribadi menyebabkan tingginya angka kecelakaan di jalan raya dan perlintasan KA; Belum terpenuhinya fasilitas keselamatan jalan ; Belum semua kendaraan bermotor wajib uji melakukan pengujian secara berkala

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Pemalang (RPJMD tahun 2021 – 2026) yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam menyusun Rancangan Renja juga mendasari pada Rancangan Renstra tahun 2021 – 2026 yang telah disahkan. Hal tersebut sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pada Rancangan Awal RKPD 2023 dimana besar anggaran yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan kinerja Dinas Perhubungan dalam melayani perhubungan di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang. Review yang dilakukan yaitu dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Berikut adalah tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan :

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023

No	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PERHUBUNGAN				14,527,132,000					14,527,132,000	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11,865,260,600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11,865,260,600	
A.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu dan akuntabel	100.00	111,576,600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu dan akuntabel	100.00	111,576,600	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISHUB	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	8 Dokumen	41,998,600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISHUB	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	8 Dokumen	41,998,600	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISHUB	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISHUB	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	-	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DISHUB	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DISHUB	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	-	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DISHUB	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DISHUB	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	-	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DISHUB	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DISHUB	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	-	

No	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISHUB	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	2 Dokumen	12,810,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISHUB	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	2 Dokumen	12,810,000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISHUB	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	3 Dokumen	56,768,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISHUB	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	3 Dokumen	56,768,000	
A.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prersentase administrasi keuangan daerah terpenuhi dalam satu tahun	100.00	8,123,690,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prersentase administrasi keuangan daerah terpenuhi dalam satu tahun	100.00	8,123,690,000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISHUB	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	78 org / 14 Bulan	8,121,734,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISHUB	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	78 org / 14 Bulan	8,121,734,000	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DISHUB	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	1000 Dokumen	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DISHUB	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	1100 Dokumen	-	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISHUB	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang tersusun	1 Dokumen	684,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISHUB	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang tersusun	1 Dokumen	684,000	
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DISHUB	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang tersusun	1 Dokumen	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DISHUB	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang tersusun	1 Dokumen	-	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DISHUB	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	12 Dokumen	1,272,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DISHUB	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	11 Dokumen	1,272,000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DISHUB	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	2 Dokumen	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DISHUB	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	2 Dokumen	-	
A.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase administrasi barang milik daerah	100.00	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase administrasi barang milik daerah	100.00	-	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DISHUB	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBU) yang tersusun	1 Dokumen	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DISHUB	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBU) yang tersusun	1 Dokumen	-	
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISHUB	Jumlah laporan barang milik daerah SKPD yang tersusun	2 Dokumen	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISHUB	Jumlah laporan barang milik daerah SKPD yang tersusun	2 Dokumen	-	
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISHUB	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang tersusun	12 Dokumen	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISHUB	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang tersusun	12 Dokumen	-	
A.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase administrasi kepegawaian perangkat daerah dalam satu tahun	100.00	12,481,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase administrasi kepegawaian perangkat daerah dalam satu tahun	100.00	12,481,000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DISHUB	Jumlah pakaian dinas terpenuhi	227 Stel	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DISHUB	Jumlah pakaian dinas terpenuhi	-	-	
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DISHUB	Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dalam satu tahun (jenis)	4 Dokumen	12,481,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DISHUB	Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dalam satu tahun (jenis)	4 Dokumen	12,481,000	

No	RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DISHUB	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DISHUB	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	82 Orang	-	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DISHUB	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan teknis	5 Orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DISHUB	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan teknis	5 Orang	-	
A.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	100.00	396,344,400	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	100.00	406,344,400	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DISHUB	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 Jenis 12 Bulan	6,550,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DISHUB	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 Jenis 12 Bulan	6,550,000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISHUB	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	2 Unit	7,347,400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISHUB	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	2 Unit	17,347,400	Pergeseran Pembayaran Tenaga Kontrak
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DISHUB	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	4 Unit	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DISHUB	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	4 Unit	-	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DISHUB	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	4 Jenis	80,450,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DISHUB	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	4 Jenis	80,450,000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DISHUB	Jenis barang cetakan yang tersedia	4 Jenis	91,685,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DISHUB	Jenis barang cetakan yang tersedia	4 Jenis	91,685,000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DISHUB	Jenis surat kabar yang tersedia	12 Bulan	5,340,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DISHUB	Jenis surat kabar yang tersedia	12 Bulan	5,340,000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISHUB	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	120 Kegiatan	204,972,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISHUB	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	120 Kegiatan	204,972,000	
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DISHUB	Jenis arsip dinamis SKPD yang tertata	2 Jenis	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DISHUB	Jenis arsip dinamis SKPD yang tertata	2 Jenis	-	
A.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase pengadaan barang milik daerah dalam satu tahun	100.00	89,935,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase pengadaan barang milik daerah dalam satu tahun	100.00	89,935,000	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISHUB	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	-	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISHUB	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	-	-	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	DISHUB	Jumlah kendaraan dinas oprasional tersedia	1 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	DISHUB	Jumlah kendaraan dinas oprasional tersedia	1 Unit	-	
3	Pengadaan Mebel	DISHUB	Jumlah mebel yang tersedia	12 Unit	16,500,000	Pengadaan Mebel	DISHUB	Jumlah mebel yang tersedia	12 Unit	16,500,000	
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISHUB	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	4 Unit	15,005,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISHUB	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	5 Unit	15,005,000	
5	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	DISHUB	Jumlah aset tetap tersedia (unit)	11 Unit	58,430,000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	DISHUB	Jumlah aset tetap tersedia (unit)	11 Unit	58,430,000	
6	Pengadaan Aset Tak Berwujud	DISHUB	Jumlah aset tak berwujud di adakan	1 Unit	-	Pengadaan Aset Tak Berwujud	DISHUB	Jumlah aset tak berwujud di adakan	1 Unit	-	
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISHUB	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan tersedia	2 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISHUB	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan tersedia		-	
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISHUB	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor di adakan	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISHUB	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor di adakan	9 Jenis	-	

No	RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	100.00	2,559,600,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	100.00	2,549,600,000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DISHUB	Jumlah surat dinas yang dikirim	1000 Surat	1,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DISHUB	Jumlah surat dinas yang dikirim	1000 Surat	1,500,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISHUB	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	3 Jenis	216,972,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISHUB	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	3 Jenis	216,972,000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISHUB	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 Jenis 12 Bulan	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISHUB	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 Jenis 12 Bulan	-	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISHUB	Jumlah honor jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	196 Orang 12 Bulan	2,341,128,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISHUB	Jumlah honor jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	196 Orang 12 Bulan	2,331,128,000	Pergeseran Pembayaran Tenaga Kontrak
A.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase pemeliharaan barang milik daerah dalam satu tahun	100.00	571,633,600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase pemeliharaan barang milik daerah dalam satu tahun	100.00	571,633,600	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISHUB	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan diperpanjang ijinnya	32 Unit	182,320,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISHUB	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan diperpanjang ijinnya	32 Unit	182,320,000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISHUB	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	45 Unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISHUB	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	45 Unit	-	

No	RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pemeliharaan Mebel	DISHUB	Jumlah mebel yang dipelihara	50 Unit	12,500,000	Pemeliharaan Mebel	DISHUB	Jumlah mebel yang dipelihara	50 Unit	12,500,000	
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISHUB	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	35 Unit	28,900,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISHUB	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	35 Unit	28,900,000	
5	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	DISHUB	Jumlah aset tetap tersedia (unit)	15 Unit	261,607,200	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	DISHUB	Jumlah aset tetap tersedia (unit)	15 Unit	261,607,200	
6	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISHUB	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	2 Unit	67,106,400	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISHUB	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	7 Jenis	67,106,400	
7	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISHUB	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	2 Unit	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISHUB	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	2 Unit	-	
8	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISHUB	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	20 Unit	19,200,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISHUB	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	20 Unit	19,200,000	
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				2,327,291,400	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				2,327,291,400	
B.1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Prosentase wilayah yang telah di tetapkan rencana induk LLAJ	40.00	233,835,250	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Prosentase wilayah yang telah di tetapkan rencana induk LLAJ	40.00	233,835,250	
			Perentase titik pengawasan LLAJ	100.00				Perentase titik pengawasan LLAJ	100.00		

No	RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kec Belik, Kec Watukumpul, Kec Bodeh, Kec Randudongkal	Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ tersusun	1 Dokumen	108,783,500	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kec Belik, Kec Watukumpul, Kec Bodeh, Kec Randudongkal	Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ tersusun	2 Dokumen	108,783,500	
2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kec Comal, Kec Ampelgading, Kec Ulujami	Jumlah Perbup Rencana Induk Jaringan LLAJ yang di tetapkan	2 Dokumen	8,276,750	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kec Comal, Kec Ampelgading, Kec Ulujami	Jumlah Perbup Rencana Induk Jaringan LLAJ yang di tetapkan	2 Dokumen	8,276,750	
3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Seluruh Wilayah Kab Pemalang	Jumlah titik pengendalian dan pengawasan LLAJ	20 Titik	116,775,000	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Seluruh Wilayah Kab Pemalang	Jumlah titik pengendalian dan pengawasan LLAJ	20 Titik	116,775,000	
B.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Presentase perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota tersedia	63.00	706,906,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Presentase perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota tersedia	63.00	706,906,000	0
1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kec Beji dan Kec Cibiyuk	Jumlah prasarana jalan Terbangun	2 Unit	447,974,000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kec Beji dan Kec Cibiyuk	Jumlah prasarana jalan Terbangun	2 Unit	447,974,000	
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Seluruh Wilayah Kab Pemalang	Jumlah perlengkapan jalan terbangun	5 Unit	78,250,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Seluruh Wilayah Kab Pemalang	Jumlah perlengkapan jalan terbangun	5 Unit	78,250,000	

No	RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	DISHUB	Jumlah prasarana jalan terpelihara	7 Unit	79,250,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	DISHUB	Jumlah prasarana jalan terpelihara	7 Unit	79,250,000	
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	DISHUB	Jumlah perlengkapan jalan terpelihara	65 Unit	101,432,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	DISHUB	Jumlah perlengkapan jalan terpelihara	65 Unit	101,432,000	
B.3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase terminal penumpang tipe C yang sesuai standar	37.50	416,024,550	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase terminal penumpang tipe C yang sesuai standar	37.50	416,024,550	
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	DISHUB	Jumlah kajian rencana pembangunan terminal type C	1 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	DISHUB	Jumlah kajian rencana pembangunan terminal type C	1 Dokumen	-	
2	Pembangunan Gedung Terminal	DISHUB	Jumlah gedung terminal yang di bangun	-	-	Pembangunan Gedung Terminal	DISHUB	Jumlah gedung terminal yang di bangun	-	-	
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	DISHUB	Jumlah sarana dan prasarana terbangun	3 Unit	-	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	DISHUB	Jumlah sarana dan prasarana terbangun	3 Unit	-	
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	DISHUB	Jumlah terminal terpelihara	3 Unit	416,024,550	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	DISHUB	Jumlah terminal terpelihara	3 Unit	416,024,550	
5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	DISHUB	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	10 Orang	-	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	DISHUB	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	10 Orang	-	
B.4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	56.94	67,982,000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	56.94	67,982,000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DISHUB	Jumlah fasilitas parkir terbangun	5 Unit	-	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DISHUB	Jumlah fasilitas parkir terbangun	-	-	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	DISHUB	Jumlah titik parkir yang di lakukan pengawasan	400 Titik	67,982,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	DISHUB	Jumlah titik parkir yang di lakukan pengawasan	400 Titik	67,982,000	
B.5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase kendaraan diuji	65.00	579,583,600	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase kendaraan diuji	65.00	579,583,600	
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	DISHUB	Jumlah sarana dan prasarana pengujian tersedia	1 Unit	90,071,600	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	DISHUB	Jumlah sarana dan prasarana pengujian tersedia	1 Unit	90,071,600	
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	DISHUB	Jumlah SDM pengujian yang mengikuti Diklat	4 Orang	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	DISHUB	Jumlah SDM pengujian yang mengikuti Diklat	4 Orang	-	
3	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	DISHUB	Jumlah bukti lulus uji di adakan	4000 Unit	109,512,000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	DISHUB	Jumlah bukti lulus uji di adakan	6500 Unit	109,512,000	

No	RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kec Belik, Kec Watukumpul, Kec Bodeh, Kec Warungpring	Jumlah peserta sosialisasi SOP Pengujian Kendaraan bermotor	-	-	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kec Belik, Kec Watukumpul, Kec Bodeh, Kec Warungpring	Jumlah peserta sosialisasi SOP Pengujian Kendaraan bermotor	200 Orang	-	
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	DISHUB	Jumlah sarana dan prasarana pengujian terpelihara	11 Unit	360,000,000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	DISHUB	Jumlah sarana dan prasarana pengujian terpelihara	11 Unit	360,000,000	
6	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	DISHUB	Jumlah koordinasi pengujian kendaraan bermotor		-	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	DISHUB	Jumlah koordinasi pengujian kendaraan bermotor	12 Bulan	-	Rumah Baru
7	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	DISHUB	Jumlah perda retribusi Pengujian Kendaraan bermotor di terbitkan		-	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	DISHUB	Jumlah perda retribusi Pengujian Kendaraan bermotor di terbitkan	-	-	
8	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	DISHUB	Jumlah dokumen kajian SKM	1 Dokumen	20,000,000	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	DISHUB	Jumlah dokumen kajian SKM	1 Dokumen	20,000,000	
B.6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase masyarakat yang menerima pengetahuan tentang lalu lintas	32.00	15,267,100	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase masyarakat yang menerima pengetahuan tentang lalu lintas	32.00	15,267,100	
1	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	DISHUB	Jumlah peserta sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	800 Orang	-	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	DISHUB	Jumlah peserta sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	-	-	

No	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Seluruh Wilayah Kab Pemalang	Jumlah titik pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	17 Titik	908,200	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Seluruh Wilayah Kab Pemalang	Jumlah titik pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	17 Titik	908,200	
3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Seluruh Wilayah Kab Pemalang	Jumlah peserta forum lalu lintas	30 Orang	14,358,900	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Seluruh Wilayah Kab Pemalang	Jumlah peserta forum lalu lintas	30 Orang	14,358,900	
B.7	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		persentase pembangunan pusat kegiatan yang sudah mempunyai dokumen andalalin	80.00	-	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		persentase pembangunan pusat kegiatan yang sudah mempunyai dokumen andalalin		-	
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	DISHUB	Jumlah Perbup Andalalin	1 Dokumen	-	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	DISHUB	Jumlah Perbup Andalalin		-	
2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	DISHUB	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	1 Dokumen	-	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	DISHUB	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan		-	
3	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	DISHUB	Jumlah pengawasan Dokumen Andalalin disuatu pusat kegiatan	10 Titik	-	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	DISHUB	Jumlah pengawasan Dokumen Andalalin disuatu pusat kegiatan		-	
B.8	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Persentase awak angkutan yang mengikuti pemilihan awak angktan teladan	20.00	100,323,700	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Persentase awak angkutan yang mengikuti pemilihan awak angktan teladan	20.00	100,323,700	

No	RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terminal Dongkal Baru, Moga, Belik, Petarukan, Comal	Jumlah kendaraan yang diramcek (Uji Petik)	50 Kendaraan	19,608,000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terminal Dongkal Baru, Moga, Belik, Petarukan, Comal	Jumlah kendaraan yang diramcek (Uji Petik)	50 Kendaraan	19,608,000	
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	DISHUB	Jumlah posko mudik	2 Posko	80,715,700	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	DISHUB	Jumlah posko mudik	2 Posko	80,715,700	
3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	DISHUB	Jumlah peserta pemilihan awak angkutan teladan	40 Orang	-	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	DISHUB	Jumlah peserta pemilihan awak angkutan teladan	40 Orang	-	Rumah Baru
4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Satu Wilayah Kab Pematang	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang di inspeksi/audit	9 Perusahaan	-	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Satu Wilayah Kab Pematang	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang di inspeksi/audit	10 Perusahaan	-	Rumah Baru
B.9	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase awak angkutan yang mengikuti pemilihan awak angkutan teladan	12.92	58,223,700	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase awak angkutan yang mengikuti pemilihan awak angkutan teladan	12.92	58,223,700	

No	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terminal Dongkal Lama, Dongkal Baru, Moga, Belik, Warungpring, Pemalang, Petarukan dan Comal	Jumlah kendaraan yang dioprasi	1200 Kendaraan	58,223,700	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terminal Dongkal Lama, Dongkal Baru, Moga, Belik, Warungpring, Pemalang, Petarukan dan Comal	Jumlah kendaraan yang dioprasi	1300 Kendaraan	58,223,700	
B.10	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penerbitan Izin Trayek Angkutan Perkotaan dan Pedesaan	77,66%	55,789,000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penerbitan Izin Trayek Angkutan Perkotaan dan Pedesaan	77,66%	55,789,000	
3	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DISHUB	Jumlah Izin Trayek / Kartu Pengawasan yang di perbaharui	109 Kendaraan	16,850,000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Satu Wil Kab Pemalang dan Luar Kota	Jumlah Izin Trayek / Kartu Pengawasan yang di perbaharui	63 Kendaraan	16,850,000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	DISHUB	Jumlah Rakor di Bidang Angkutan/Perhubungan (kali)	23 Kali	38,939,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Luar Kota	Jumlah Rakor di Bidang Angkutan/Perhubungan (kali)	30 Kali	38,939,000	
						Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
						Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Luar Kota	Pelaksanaan studi banding tentang pelayanan angkutan BRT	1 Tahun	-	Rumah Baru
						Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Satu Wilayah Kab Pemalang	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan angkutan BRT	25 orang	-	Rumah Baru
						Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					

No	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satu Wilayah Kab Pemalang	Kajian evaluasi jaringan trayek angkot	1 Dokumen	-	Rumah Baru
						Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satu Wilayah Kab Pemalang	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan angkutan	25 orang	-	Rumah Baru
						Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satu Wilayah Kab Pemalang	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	Rumah Baru
						Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
						Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perdesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Satu Wilayah Kab Pemalang	Kajian evaluasi jaringan trayek angkudes	1 Tahun	-	Rumah Baru

No	RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perdesaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Satu Wilayah Kab Pemalang	terselenggaranya sosialisasi kebijakan angkutan	12 Bulan	-	Rumah Baru
						Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
						Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Satu Wilayah Kab Pemalang	Kajian kebutuhan angkutan taksi	1 Dokumen	-	Rumah Baru
						Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Satu Wilayah Kab Pemalang	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan angkutan	25 orang	-	Rumah Baru

No	RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
						Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang wilayah operasinya kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Satu Wilayah Kab Pemalang	Terselenggaranya Fasilitasi perizinan angkutan taksi	25 orang	-	Rumah Baru
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Satu Wilayah Kab Pemalang	Kegiatan rakor, Konsultasi/Koordinasi	12 Bulan	-	Rumah Baru
B.1 1	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase ketersediaan Dokumen Evaluasi Jaringan Trayek	60.87	93,356,500	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase ketersediaan Dokumen Evaluasi Jaringan Trayek	60.87	93,356,500	

No	RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DISHUB	Jumlah dokumen evaluasi jaringan trayek tersusun	1 Dokumen	93,356,500	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DISHUB	Jumlah dokumen evaluasi jaringan trayek tersusun	1 Dokumen	93,356,500	
C	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Prosentase persyaratan pembangunan pelabuhan yang terpenuhi	100.00	334,580,000	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Prosentase persyaratan pembangunan pelabuhan yang terpenuhi	100.00	334,580,000	
C.1	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		jumlah persyaratan pembangunan pelabuhan yang di penuhi	1 Dokumen	334,580,000	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		jumlah persyaratan pembangunan pelabuhan yang di penuhi	1 Dokumen	334,580,000	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	DISHUB	Jumlah kajian pembangunan pelabuhan yang di susun	1 Dokumen	-	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	DISHUB	Jumlah kajian pembangunan pelabuhan yang di susun	1 Dokumen	-	

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan program/kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang tidak melaksanakan program/kegiatan hasil Musrenbang yang telah diusulkan dari masyarakat

Tabel 2.5
Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan (Ranking)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

A. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Visi Kementerian Perhubungan adalah “Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”, dengan misi

- Meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
- Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi bencana;
- Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
- Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
- Mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Adapun tujuannya adalah :

- Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
- Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
- Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
- Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
- Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi

Sasaran strategis pembangunan transportasi nasional Tahun 2020-2024 adalah:

- Terwujudnya konektivitas nasional
- Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan
- Meningkatkan keselamatan transportasi
- Meningkatkan kualitas SDM transportasi yang kompeten
- Meningkatkan tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum
- Meningkatnya pengawasan dan pengendalian;
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
- Meningkatnya kualitas transportasi berkelanjutan

Beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari hasil telaah Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 yang berkaitan dengan kepentingan Kabupaten Pematang Jaya adalah:

- 1) Meningkatnya integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah; hal ini selaras misi pemerintah daerah yaitu Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya sebagaimana dimaksud untuk mendukung sasaran daerah Meningkatkan Konektivitas antar wilayah dengan Meningkatkan kemudahan akses transportasi masyarakat serta Meningkatkan ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat
- 2) Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang professional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan; ini sejalan dengan rencana Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya antara lain :
 - Meningkatkan sarana prasarana terminal type C,
 - Peningkatan pemanfaatan teknologi pada pengujian kendaraan bermotor, pemantauan lalu lintas dan sarana prasarannya,
 - Pemenuhan dan Peningkatan SDM yang professional pada Dinas Perhubungan yang bekerja sama dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD dalam bidang perhubungan darat.
- 3) Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang

berdaya saing internasional, mandiri dan produktif; ini sejalan dengan program Dinas Perhubungan dalam pemenuhan sarana prasarana jalan; peningkatan pengelolaan parkir tepi jalan umum, peningkatan kompetensi SDM pada pengujian kendaraan bermotor, pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum dalam bentuk pemilihan Abdi Yasa Teladan.

Dari kesimpulan hasil telaah Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 terdapat permasalahan pelayanan PD berdasarkan sasaran K/L berikut tabel permasalahan pelayanan :

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	Nilai indek kepuasan masyarakat pada pelayanan terminal masih rendah	Anggaran untuk peningkatan sarana prasana perhubungan terbatas	Adanya perhatian khusus dari pemerintah Daerah
2	Meningkatnya keselamatan trasnpotasi Meningkatnya kualitas SDM transportasi yang kompeten	Masih rendanya kualitas dan kuantitas sarana prasarana serta SDM perhubungan	Pengadaan sarana prasarana Lalu lintas kurang optimal, belum terpenuhinya SDM yang profesional	Adanya dukungan dari Pemerintah daerah, Provinsi dan pusat.
3	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum Meningkatnya pengawasan dan pengendalian Meningkatnya pengawasan dan pengendalian Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Rencana Induk LLAJ yang ada saat ini tidak relevan dengan kondisi sekarang	Belum di lakukannya evaluasi Rencana Induk LLAJ	Adanya dukungan dari pemerintah Daerah untuk evaluasi Renacana Induk LLAJ

B. Telaah Kebijakan Nasional

1. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 yang menjelaskan Arahan Presiden dalam melaksanakan misi Nawacita dan upaya pencapaian Visi Indonesia 2045 yaitu

- a. Pembangunan SDM Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama dengan tujuan membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama. Cara baru yang perlu dikembangkan salah satunya dengan endowment fund yang besar untuk manajemen SDM, pengoptimalan kerjasama dengan industri, serta penggunaan

teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

- b. Pembangunan Infrastruktur Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan membangun infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi dan mempermudah akses ke kawasan wisata sehingga dapat mendongkrak lapangan kerja baru dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
- c. Penyederhanaan Regulasi Penyederhanaan, pernotongan, dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi. Langkah pertama adalah dengan cara menerbitkan 2 (dua) undang-undang besar yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Kedua Undang-Undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu Undang-Undang yang sekaligus merevisi beberapa Undang-Undang, bahkan puluhan Undang-Undang.
- d. Penyederhanaan Birokrasi Penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, pemotongan prosedur yang panjang, dan pemangkasan birokrasi yang panjang. Penyederhanaan eselonisasi juga diperlukan sehingga menjadi 2 level saja yaitu diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan menghargai kompetensi. Tujuan program pembangunan juga harus dilakukan secara serius oleh Menteri, Pejabat, dan Birokrat.
- e. Transformasi Ekonomi Transformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2. Arah kebijakan dan strategi dalam rangka memperkuat infrasturktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar :

- a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong : peningkatan rumah tangga yang menempati hubian layak dan terjangkau, penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, peningkatan persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi

(kumulatif) dan peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);

- b. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong : penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 Km), peningkatan persentase rute pelayaran yang saling terhubung, peningkatan kondisi jalur kereta Api (KA) sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) Kategori 1 dan 2, dan peningkatan persentase capaian *On Time Performance* (OTP) transportasi udara;
- c. Meningkatnya layanan infrastruktur Perkotaan dengan mendorong : kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal Perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) dan peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau diperkotaan;
- d. Meningkatnya layanan energi dan tenaga listrikan dengan mendorong : peningkatan rasio elektrifikasi, rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kwh/kapita) dan penurunan emisi GRK sector energi (juta ton);
- e. Meningkatnya layanan infrasturktur teknologi informasi dan kounikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G)

Berdasarkan sasaran dan target prioritas nasional berikut arahan kebijakan yang akan dilakukan yaitu

- 1) Arah kebijakan penyelenggaraan keselamatan dan keamanan transportasi serta pencarian dan pertolongan yaitu :
 - a. Mendorong pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 1/2022 tentang rencana umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ), yang didalamnya termasuk pelaksanaan intergrasi data dan sistem informasi keselamatan LLAJ, penanganan daerah rawan kecelakaan (blackspot) secara terpadu melalui penanganan infrastruktur jalan penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan, serta penetapan waktu respons penanganan kagawat daruratan sejak terjadinya kecelakaan
 - b. Meningkatkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi antara lain pemenuhan Infrastructure Maintenance and Operation (IMO)

prasarana Perkeretaapian, penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran, penyediaan sistem monitoring fasilitas Surveillance dan navigasi penerbangan terintegrasi; serta (3) Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM serta pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana di bidang pencarian dan pertolongan.

- 2) Arah kebijakan pembangunan konektivitas dalam mendukung produktivitas untuk transformasi ekonomi antara lain
 - a. Melanjutkan pembangunan jalan tol, jalan baru dan pembangunan jalur kereta api pada koridor utama angkutan penumpang dan logistik termasuk kereta api cepat untuk penumpang antar kota – kota besar di Pulau Jawa, serta pembangunan akses jalan dan kereta api ke simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal) dengan memperhatikan aspek kemanfaatan;
 - b. Menyediakan konektivitas multimoda mendukung kawasan prioritas (food estate, industri dan pariwisata);
 - c. Melakukan standardisasi pelabuhan utama meliputi infrastruktur, fasilitas dan kinerja pelabuhan utama simpul angkutan domestik, integrasi pelabuhan dan kawasan industri serta reformasi tarif jasa pelabuhan;
 - d. Melanjutkan pembangunan bandara baru, peningkatan kapasitas bandara primer dan jaringan hub and spoke penerbangan, serta pembangunan bandara perairan (waterbase Airport) untuk mendukung destinasi pariwisata kepulauan;
 - e. Menyediakan infrastruktur dan layanan transportasi di wilayah 3T, termasuk keperintisan, program tol laut bersubsidi dan jembatan udara;
 - f. Meningkatkan infrastruktur konektivitas milik daerah dalam mendukung prioritas nasional, melalui optimalisasi peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pemanfaatan skema DAK dan program hibah untuk penanganan jalan daerah, rehabilitasi prasarana pelabuhan yang melayani angkutan penumpang dan barang;
 - g. Melakukan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun dan sinkronisasi antar infrastruktur lainnya.

- 3) Arah kebijakan pembangunan infrastruktur perkotaan difokuskan pada pengembangan sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan, terutama dalam penataan beberapa aspek yang selaras dengan prinsip pembangunan mobilitas perkotaan, yaitu
- a. Dalam aspek kelembagaan, pemerintah daerah di suatu wilayah metropolitan didorong untuk mengembangkan kelembagaan pengelola transportasi perkotaan yang memiliki kewenangan perencanaan, pengelolaan, dan pengoperasian angkutan umum lintas wilayah administrasi;
 - b. Dalam aspek perencanaan, pemerintah daerah di wilayah metropolitan didorong agar menyusun Rencana Mobilitas Perkotaan (RMP) terpadu sebagai dasar pembangunan angkutan massal perkotaan yang berbasis wilayah fungsional dengan berfokus pada aksesibilitas pusat kegiatan sosial dan ekonomi;
 - c. Dalam aspek pendanaan, dikembangkan skema pendanaan pembangunan sistem angkutan umum massal perkotaan yang memastikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, mengoptimalkan partisipasi badan usaha, serta memberikan ruang bagi dukungan pendanaan pemerintah pusat dengan tetap menjamin kepemilikan (ownership) serta keberlanjutan pengelolaan dan pengoperasian oleh pemerintah daerah; selain itu beberapa kebijakan terus dilanjutkan seperti
 - d. Mengembangkan angkutan komuter di wilayah perkotaan;
 - e. Melaksanakan program dukungan penyelenggaraan angkutan umum massal melalui skema Buy the Service (BTS) dan Public Service Obligation (PSO);
 - f. Mendorong penguatan infrastruktur TIK dengan teknologi terbaru dan mekanisme pemakaian bersama infrastruktur pasif dalam mendukung pengembangan kota cerdas (smart city).

C. Telaah Renstra Provinsi Jawa Tengah

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Tengah. Misi kepala daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan Provinsi Jawa Tengah adalah pada misi ke tiga

yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan gubernur No. 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terdapat program kerja Kepala Daerah yang difokuskan pada sektor transportasi yaitu pada program kerja Ke-7 “Pengembangan Transportasi Massal, Revitalisasi Jalur Kereta Dan Bandara Serta Pembangunan Embung/Irigasi”.

Hal ini selaras dengan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang yaitu Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Permasalahan pelayanan PD berdasarkan sasaran Renstra Provinsi beserta faktor penghambat atau pendorong keberhasilan penanganannya sebagai berikut:

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	Menurunnya minat masyarakat menggunakan layanan transportasi umum	Jumlah kendaraan pribadi meningkat	Dukungan dari pemerintah prov. untuk penyediaan angkutan umum masal dan peningkatan pelayanan
2	Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi	Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi	Terbatasnya anggaran untuk alokasi pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pusat

D. Telaah Visi Misi Pemerintahan Kabupaten Pemalang

a. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah

terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pematang Jaya dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Pematang Jaya yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”**.

Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1) Adil

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pematang Jaya dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya

2) Makmur

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pematang Jaya yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

3) Agamis

Agamis adalah kondisi Kabupaten Pematang Jaya yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

4) Ngangeni

Ngangeni adalah kondisi Kabupaten Pematang Jaya yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pematang Jaya sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. “Pematang Jaya itu ngangeni”

b. Misi

Pencapaian visi **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”** ditempuh melalui 6 (enam) misi adalah :

- Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
- Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong
- Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan Perkotaan
- Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi local
- Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan

E. Visi Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang

a. Visi

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Tahapan sebagaimana tersebut di atas, dimulai dengan perumusan visi yang jelas. Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar Eksis, Antisipatif, dan Inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan instansi pemerintah. Visi tersebut harus mampu :

- Menarik, komitmen, dan menggerakkan orang;
- Menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi;
- Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan (yang akan datang).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang mempunyai pernyataan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Pelayanan Jasa Transportasi yang Aman, Nyaman, yang handal efektif dan efisien, yang berdaya saing”.

Penjelasan Makna Visi :

Pelayanan Jasa transportasi yang dilaksanakan secara profesional dan mudah diharapkan dapat menciptakan rasa aman dan nyaman yang diperoleh masyarakat. Mampu meningkatkan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak, sehingga tercipta masyarakat yang cerdas dan sejahtera.

b. Misi

Untuk dapat meraih terwujudnya visi tersebut di atas, maka perlu ditetapkan suatu misi, yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang dipilih. Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang adalah :

- 1) Mengembangkan manajemen transportasi darat yang memadai;
- 2) Meningkatkan jasa teknis pemeriksaan kendaraan bermotor;
- 3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan
- 4) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Perhubungan

Penjelasan Makna Misi

Makna dari misi Pertama adalah bahwa Pengembangan Manajemen Transportasi Darat dapat terciptanya peningkatan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, dan ketertiban berkendara merupakan wujud dari kedisiplinan para pengguna jalan.

Makna dari misi Kedua adalah bahwa Peningkatan Jasa Teknis Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan keselamatan berkendara di jalan pada umumnya, selain itu juga dapat meningkatkan SDM Penguji Kendaraan Bermotor yang profesional, dan juga dapat meningkatkan PAD.

Makna dari Misi Ketiga Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan adalah meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan berupa terminal, halte, dan alat pengamanan perlintasan KA dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi dan meningkatkan keselamatan transportasi jalan.

Makna dari Misi Keempat Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Perhubungan dalam rangka peningkatan daya saing dan profesionalisme adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban Dinas Perhubungan dengan segala isu-isu serta permasalahannya yang telah dipaparkan dalam BAB II, maka Renja Dinas Perhubungan mempunyai tujuan dan sasaran agar visi dan misi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun dapat tercapai.

A. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang adalah **“Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah”**, dengan indikator Rasio Konektivitas di Kabupaten Pemalang, diharapkan pada akhir tahun 2026 mencapai 76,75 %. Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud untuk mendukung sasaran daerah misi ke-6 **“Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan”** pada tujuan ke-2 **“meningkatkan konektivitas antar wilayah”**
- 2) Sasaran Untuk mendukung pencapaian tujuan dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang terdapat beberapa sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatkan Pelayanan Angkutan dan indikator sasaran Prosentase pelayanan angkutan jalan di Kabupaten Pemalang, diharapkan pada akhir tahun 2026 mencapai 64,86%
 - Meningkatkan Sarana prasarana perhubungan dan indikator sasaran level of service, diharapkan pada akhir tahun 2026 mencapai 0,42%.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator sasaran dalam mencapai pembangunan bidang Perhubungan di Kabupaten Pemalang dapat dilihat melalui tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan
Kabupaten Pematang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya tatakelola organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang		Nilai Reformasi Birokrasi	Persen	57
		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang	Nilai Sakip	Persen	55,6
2	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah		Rasio Konektivitas	Persen	75,75
		Meningkatnya Pelayanan Angkutan	Persentase Pelayanan Angkutan Jalan	Persen	0,5
		Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan	Level Of Service	Persen	0,44

B. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Strategi

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai Misi dan Program Kerja Kepala Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Misi dan program kerja tersebut maka dirumuskan strategi 5 (lima) tahun mendatang. Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dari Dinas Perhubungan adalah dengan:

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Angkutan.
- Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- Mengembangkan Jaringan layanan Lalu Lintas

2) Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2021- 2026 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi wilayah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Kebijakan tersebut disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang 2021-

2026 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan. Arah kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi Konektifitas, Keselamatan dan Kenyamanan Transportasi. Adapun arah kebijakan dimaksud adalah Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya 2021-2026 V-87 Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya dalam lima tahun mendatang yang dapat dilihat pada berikut ini:

VISI : Terwujudnya Kabupaten Pematang Jaya yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni			
MISI 6 : Mewujudkan pembangunan Infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Angkutan	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Angkutan Jalan serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien	Mengembangkan angkutan umum untuk meningkatkan aksesibilitas
			Melibatkan instansi terkait dalam peningkatan pembinaan dan pemahaman penyedia layanan transportasi untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di Kabupaten Pematang Jaya;
			Menerapkan protokol kesehatan pada angkutan aglomerasi perkotaan yang beroperasi.
			Melengkapi fasilitas sarana prasarana penyelenggaraan terminal tipe C di Kabupaten Pematang Jaya
	Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Koordinasi Sinkronisasi program/kegiatan di sektor perhubungan dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
			Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pelayanan kepada masyarakat menggunakan teknologi informasi;
			Menyediakan, meningkatkan dan mempertahankan kinerja sarana prasarana transportasi untuk mendukung pengembangan kawasan strategis wilayah di Kabupaten Pematang Jaya
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana prasarana transportasi di Kabupaten Pematang Jaya;

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Tahun 2021-2026 yang bereferensi pada RPJM Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai arah kinerja SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Dinas serta terjaminnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dan PD yang menjadi bidang tugas.

Disamping kedudukan yang demikian, program dan kegiatan Dinas Tahun 2023 diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat serta tolak ukur pencapaian arah kebijakan, visi dan misi Bupati Pemalang yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021– 2026.

Dari prioritas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang menetapkan beberapa sasaran seperti tersebut di atas. Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut, diperlukan dukungan oleh segenap komponen organisasi yang terintegrasi dalam rencana program dan kegiatan terpadu. Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang pada Tahun 2023 terdiri dari 3 Program dan 20 Kegiatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tidak Terwujud

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten

- Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

- 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten;
 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- 3) Pengelolaan Terminal Tipe C;
 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
 - Pembangunan Gedung Terminal
 - Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
- 4) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 6) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan Kab.;
- Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
- 7) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
 - Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
- 8) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
- Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
- 9) Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- 10) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
- 11) Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk angkutan orang
- Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- C. Program Pengelolaan Pelayaran
- 1) Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 menjelaskan mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatif untuk tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024. Hal ini digunakan untuk mengetahui capaian program dan kegiatan Dinas Perhubungan dalam mendukung misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan yaitu Misi 6 **“Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Kuat dan Berkesinambungan”** dengan tujuan **“Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah”**.

Berikut rencana kerja dan pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang tahun 2023 yang dijelaskan pada tabel 4.1 :

Tabel 4.1
Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Nasional	Daerah			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14,527,132,000				15,520,300,000	
2.15	BIDANG PERHUBUNGAN			14,527,132,000				15,405,300,000	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11,865,260,600				12,294,300,000	
2.15.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			111,576,600				140,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	8 Dokumen	41,998,600		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	8 Dokumen	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.06	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	2 Dokumen	12,810,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	2 Dokumen	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.07	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	56,768,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	3 Dokumen	70,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8,123,690,000				8,202,300,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Nasional	Daerah			
2.15.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	12 Bulan	8,121,734,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	12 Bulan	8,200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusun	1 Dokumen	684,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	1 Dokumen	800,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.07	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	12 Dokumen	1,272,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	12 Dokumen	1,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12,481,000				15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.05.05	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan pengendalian pembangunan yang tersusun	4 Jenis	12,481,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	4 Jenis	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			396,344,400				457,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis komponen instalasi /penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 Bulan	6,550,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	12 Bulan	7,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Nasional	Daerah			
2.15.01.2.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	17,347,400		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	2 Jenis	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jenis Bahan Logistik Kantor yang tersedia	4 Jenis	80,450,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	4 Jenis	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	4 Jenis	91,685,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	4 Jenis	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jenis surat kabar yang tersedia	12 Bulan	5,340,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	12 Bulan	10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	120 Kegiatan	204,972,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	120 Kegiatan	230,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			89,935,000				93,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Nasional	Daerah			
2.15.01.2.07.05	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia	12 Unit	16,500,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	12 Unit	17,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.06	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang tersedia	4 Unit	15,005,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	4 Unit	16,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.07	Sub Kegiatan : Pengadaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset tetap tersedia	11 Unit	58,430,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	11 Unit	60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2,559,600,000				2,722,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang dikirim	1000 Surat	1,500,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	1000 Surat	2,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	3 Jenis	216,972,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	3 Jenis	220,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah honor jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	196 Orang	2,331,128,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	196 Orang	2,500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Nasional	Daerah			
2.15.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			571,633,600				665,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	32 Kendaraan	182,320,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	32 Kendaraan	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.05	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang dipelihara	50 Unit	12,500,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	50 Unit	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.07	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap terpelihara	15 Unit	28,900,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	15 Unit	40,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	2 Unit	261,607,200		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	2 Unit	300,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.10	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	2 Unit	67,106,400		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	2 Unit	80,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.11	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	20 Unit	19,200,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	20 Unit	25,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Nasional	Daerah			
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			2,327,291,400				2,701,000,000	
2.15.02.2.01	Kegiatan : Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			233,835,250				315,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.01	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ tersusun	1 Dokumen	108,783,500		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	1 Dokumen	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.02	Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Perbub rencana Induk Jaringan LLAJ yang ditetapkan	2 Dokumen	8,276,750		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	2 Dokumen	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.03	Sub Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah titik pengendalian dan pengawasan LLAJ	20 Titik	116,775,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	20 Titik	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02	Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan jalan di Jalan kabupaten/Kota			706,906,000				800,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.01	Sub Kegiatan : Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah prasarana jalan terbangun	2 Unit	447,974,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	2 Unit	500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan terbangun	5 Unit	78,250,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	5 Unit	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Nasional	Daerah			
2.15.02.2.02.03	Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	jumlah prasarana jalan terpelihara	7 Unit	79,250,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	7 Unit	90,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.04	Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	jumlah perlengkapan jalan tersedia	65 Unit	101,432,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	65 Unit	110,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03	Kegiatan : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			416,024,550				450,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03.04	Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	jumlah terminal terpelihara	3 Unit	416,024,550		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	3 Unit	450,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			67,982,000				70,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Titik parkir yang dilakukan pengawasan	400 Titik	67,982,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	400 Titik	70,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05	Kegiatan : Pengujian Kendaraan Bermotor			579,583,600				670,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	jumlah sarana dan pras	1 Unit	90,071,600		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	1 Unit	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Nasional	Daerah			
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	jumlah bukti lulus uji dia	4000 Set	- 109,512,000-		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	4000 Set	120,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	jumlah sarana dan prasarana pengujian terpelihara	11 Unit	360,000,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	11 Unit	400,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian kendaraan Bermotor	jumlah dokumen kajian SKM	1 Dokumen	20,000,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			15,267,100				16,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	jumlah titik pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	17 Titik	908,200		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	17 Titik	1,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	jumlah peserta forum lalu lintas	30 Orang	14,358,900		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	30 Orang	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan			100,323,700				130,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Nasional	Daerah			
2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah kendaraan yang di ramcek(uji petik)	50 Kendaraan	19,608,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	50 Kendaraan	30,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	jumlah posko mudik	2 Posko	80,715,700		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	2 Posko	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang antar kota dalam 1 (satu)			58,223,700				80,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09.02	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	jumlah kendaraan yang dioprasi	1200 Kendaraan	58,223,700		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	1200 Kendaraan	80,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			55,789,000				70,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah izin trayek/kartu pengawasan yang diperbaharui	109	16,850,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	109	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota	23 Laporan	38,939,000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	23 Laporan	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
					Nasional	Daerah			
2.15.02.2.16	Penetapan tarif kelas ekonomi untk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dala 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota			93,356,500				100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.16.02	Penyediaan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	93,356,500		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;		100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			334580000				400,000,000	
2.15.03.2.13	Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau			334580000				400,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.2.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sebagai sungai dan Danau	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang dilaksanakan	1 Dokumen	334580000		Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;	1 Dokumen	400,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 mengacu pada Rancangan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023. Renja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dengan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pemalang, sehingga target kinerja pada akhir tahun periode Renstra dapat tercapai.

Dinas Perhubungan melaksanakan satu urusan yaitu urusan perhubungan. Urusan perhubungan diprioritaskan pada peningkatan manajemen transportasi darat, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perhubungan, dan peningkatan pelayanan angkutan. Dalam hal ini terdapat kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan Renja tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang

1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dapat berjalan dengan baik maka perlu kaidah pelaksanaan yang harus diperhatikan yaitu :

- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang harus mampu melaksanakan tujuan, sasaran, program, kegiatan yang ada didalam Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023.
- b. Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 sesuai dengan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023.
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2023, Kepala Dinas harus mengawasi dan mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan tahun 2023.

2. Rencana Tindak Lanjut

Adapun tindak lanjut yang perlu diperbaiki dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan tahun 2023, hal ini untuk menjadi perhatian yang diharapkan tidak terulang Kembali pada penyusunan Renja di tahun selanjutnya :

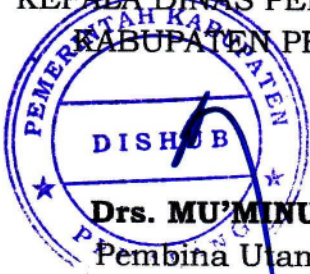
- a. Perlu adanya kerjasama yang baik antara unsur eksekutif dan legislatif dalam memberikan data maupun informasi yang diperlukan, agar dalam penyusunan Renja dapat berjalan lancar.
- b. Perlu adanya saran dan kritik yang membangun dalam merumuskan program/kegiatan Dinas Perhubungan agar dalam pelaksanaan program/kegiatan di tahun selanjutnya dalam tercapai dengan baik.

Program dan kegiatan yang disusun dalam Renja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi, prioritas, dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah pada tahun anggaran bersangkutan.

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2023, dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir.

Sebagai konsekuensinya diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2023, yang akan terwujud dalam perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

Pemalang, Juli 2022
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG



Drs. MU'MINUN., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196805261994031005